

Judul : Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK: langkah pegawai KPK mengajukan uji materi hak angket DPR, keinginan mereka sendiri

Tanggal : Sabtu, 15 Juli 2017

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 2

LAODE M SYARIF, Wakil Ketua KPK

Langkah Pegawai KPK Mengajukan Uji Materi Hak Angket DPR, Keinginan Mereka Sendiri

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Alasan mereka melakukan hal itu adalah karena sejumlah ahli hukum tata negara beranggapan hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang itu tidak dapat digunakan kepada lembaga independen, seperti KPK.

BEBERAPA putusan MK pun dianggap telah menegaskan posisi dan landasan konstitusional KPK. Mereka meyakini KPK tidak termasuk dalam ruang lingkup lembaga Pemerintah. Berikut penuturan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif terkait manuver DPR mengajukan hak angket;

Tanggapan Anda terhadap langkah yang diambil pegawai KPK untuk menentang hak angket DPR itu?

Langkah pegawai karena keinginan mereka sendiri, dan bersifat independen, bukan atas dorongan pimpinan. Tapi pimpinan merestui *judicial review* tersebut.

Lho mengapa pimpinan cuma memberikan restu saja, tanpa ikut mem-back upnya ?

Karena memang secara konstitusional ya itu adalah hak-hak pegawai KPK, karena itu yang menyangkut, yang berhubungan dengan kerja-kerja KPK.



Dan Saya pikir banyak sekali lagi orang-orang yang ingin judicial review supaya jadi terang kewenangan KPK serta DPR.

Menurut mereka tak tepat DPR menggunakan hak angket kepada KPK. Anda setuju?

Pendapat mereka itu kan didasarkan pada pandangan ahli hukum tata negara yang kami mintai pendapatnya. Dan pendapat itu memang sama seperti pemikiran kami.

Banyak kalangan menilai manuver DPR menggunakan hak angket kepada KPK dipicu oleh progress penanganan perkara KTP elektronik (e-KTP). Hingga kini perkembangan dari pemeriksaan perkara itu sendiri sampai mana?

Pemeriksaan tetap berjalan seperti biasa, tetap berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah ditetapkan, planning dan strategi. Kelanjutan penyelidikan e-KTP hasilnya saya belum tahu, karena pemeriksaan terus berlangsung.

Apakah akan ada Jum'at keramat lagi?

Jum'at keramat tidak ada, Jum'atnya biasa saja.

Soal lain. PT Nusa Konstruksi Enjiniring kan baru saja ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Baru kali ini KPK menetapkan korporasi sebagai tersangka. Apa saja sih alasannya?

Saya menyambut baik penetapan itu, karena ini artinya ada sejarah baru KPK hari ini. Belum pernah terjadi korporasi

dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka hari ini KPK mulai babak baru itu.

Bukankah sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) pernah menetapkan korporasi sebagai tersangka?

Betul, di kejaksaan sudah ada dua perusahaan yang terkena pidana korupsi.

KPK akan mulai, ini juga sekaligus juga implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (MA) tentang tanggung jawab pidana korporasi. Jari patut disyukuri.

Sangkaan apa yang akan diterapkan?

Saya belum bisa memberitahu secara detail tentang itu. Nanti akan di-update, karena kebetulan saya belum sempat meneliti secara menyeluruh. ■ NDA